



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Laporan Kinerja

2022



bangga
melayani
bangsa



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon 45113

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2022
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Cirebon , 14 Januari 2023

Disetujui oleh :

Penanggung Jawab,
Kepala PPN Kejawanan



Sarwono, A.Pi

Disusun oleh :

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Yusuf Santoso'.

M. Yusuf Santoso, A.Md S.Pi

KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKT Tahun 2022, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2022 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2022 namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di tahun 2024.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Tim Penyusun

RINGKASAN Eksekutif

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan dukungan anggaran **Rp18.565.177.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp18.454.925.279,-** atau **99,41%** dari total pagu Tahun 2022. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **114,73%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerja pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022

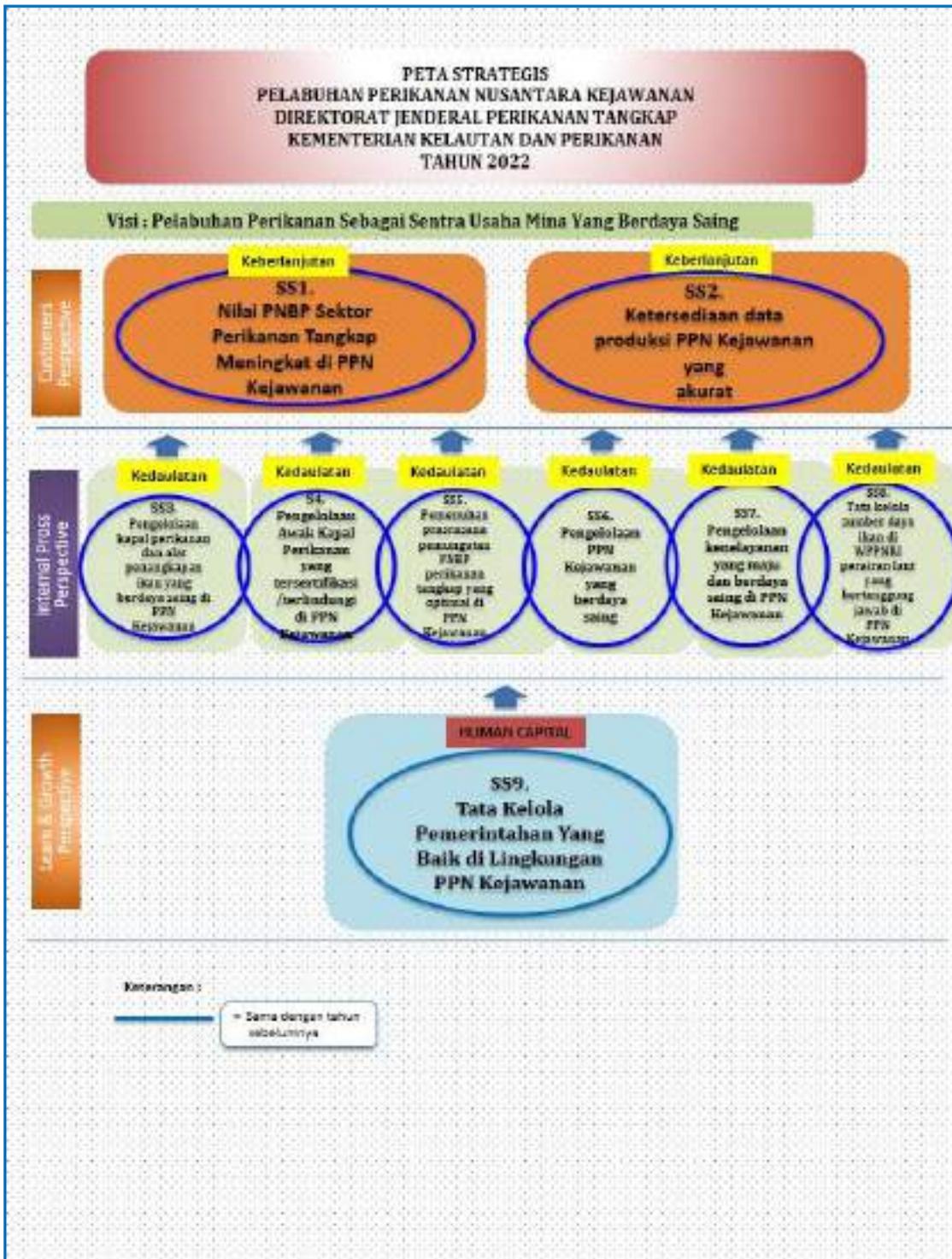
Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Tahun 2022 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator sebagai berikut :

1. IK1 – Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)

2. IK2 – Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)
3. IK3 – Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
4. IK4 – Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang)
5. IK5 – Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)
6. IK6 – Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk menunjang PNBPN perikanan tangkap (Unit)
7. IK7 – Tingkat operasional operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
8. IK8 – Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)
9. IK9 – Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)
10. IK10 – Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
11. IK11 – Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)
12. IK12 – Nilai Penilaian Mandiri / PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 – IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 – Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (Persen)
15. IK15 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK16 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
17. IK17 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK18 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi Pelabuan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2022 dapat disajikan pada diagram di bawah ini.



Gambar 2. Dashboard Peta Strategis Tahun 2022 pada Aplikasi Kinerja

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. SDM PPN Kejawanan	6
F. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap	9
B. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	14
C. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	49
LAMPIRAN	
- SK TIM PENYUSUNAN LAKIP TA 2022	
- MANUAL IKU	
- PERJANJIAN KINERJA TA 2022	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, KKP telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru yaitu (1) Perluasan Kawasan konservasi perairan; (2) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal; (4) Pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut yang diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP. Oleh karena itu, kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang disusun setiap tahun.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

B. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Selain itu Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF.

Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada Fasilitas Pokok seperti Penahan Gelombang, Dermaga, Kolam dan Alur Pelayaran, Rambu Navigasi, Jalan Masuk dan Jalan Komplek, TPI dan lain-lainnya. Setelah melewati tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 di operasionalkan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuriana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

PPN Kejawanan yang terletak di Pantai Utara bagian timur Provinsi Jawa Barat menjadi posisi yang strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan investasi dan sektor pariwisata. Hal ini tidak terlepas baik dari segi potensi perikanan, maupun dari segi pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, perhubungan/transportasi, telekomunikasi, listrik, Air PDAM, sumberdaya manusia dan lain-lain.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanaan; dan/atau keimigrasian.

2. Fungsi perusahaan yaitu fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

D. Struktur Organisasi

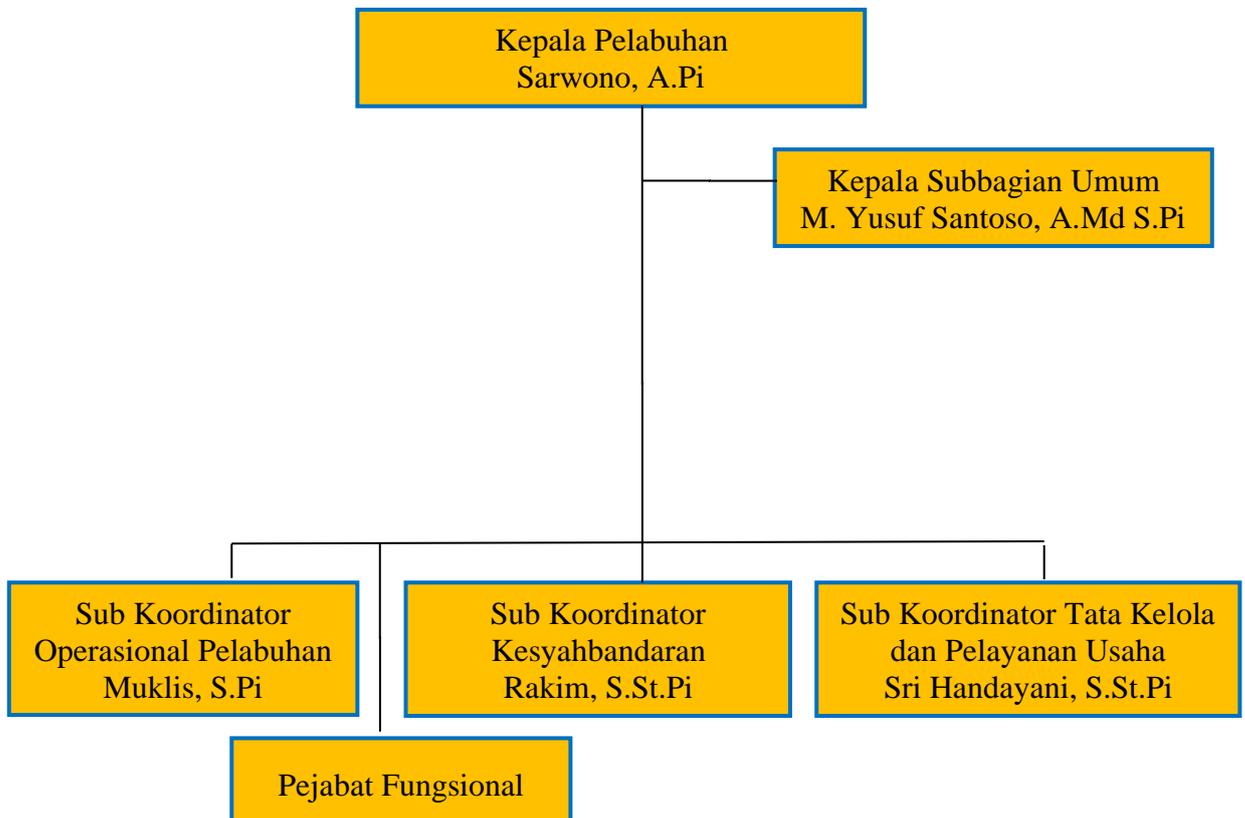
Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Bagian Operasional dipimpin oleh Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
2. Bagian Kesyahbandaran, dipimpin oleh Sub Koordinator Kelompok Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Sub koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.
4. Subbagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran,

hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Pertama), Pranata Keuangan APBN (Mahir), Analis Kepegawaian, Pengawas Perikanan (Mahir), Pranata Humas (Terampil), Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) serta Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T).



Gambar 3. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

E. SDM PPN Kejawanan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di dukung oleh 66 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 47 orang, PPPK sebanyak 4 orang dan Pramubakti sebanyak 15 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2022 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	- Subbagian Tata Usaha	1	5	4	-	10
3.	Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	- Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	3	3	-	6
4.	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	1
	- Bagian Operasional Pelabuhan	-	1	1	1	3
5.	Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	- Bagian Kesyahbandaran	-	-	4	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	- Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	1	-	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	4	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	1	-	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	2	-	-	2
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1

	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	1	-	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Pranata Humas (Terampil)	-	1	-	-	1
7.	PPPK					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	2	-	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	2	-	-	-	2
8.	Pegawai Pramubakti	15	-	-	-	15
Jumlah		20	14	24	2	66

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah	
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP		SD
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Subbagian Tata Usaha	-	-	3	-	6	1	-	10
3.	Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	2	-	4	-	-	6
4.	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Bagian Operasional Pelabuhan	-	1	-	-	2	-	-	3
5.	Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Bagian Kesyahbandaran	-	-	4	-	-	-	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu								
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	4	-	-	-	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	1	-	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	-	2	-	-	2
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Pranata Humas (Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
7.	PPPK								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	2	-	-	2
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	5	1	9	-	-	15

Jumlah	-	1	31	3	27	1	-	66
--------	---	---	----	---	----	---	---	----

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1.	Kepala Pelabuhan	1	1	-
2.	Kepala Subbagian Umum	1	1	-
	- Subbagian Tata Usaha	10	8	2
3.	Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	1
	- Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	6	6	-
4.	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan	1	1	-
	- Bagian Operasional Pelabuhan	3	3	-
5.	Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran	1	1	-
	- Bagian Kesyahbandaran	4	4	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Pranata Komputer (Muda)	1	1	-
	- Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	1	1	-
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pertama)	4	2	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	1	1	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	2	2	-
	- Asisten Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	1	-	1
	- Asisten Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Pertama)	1	1	-
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	1	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	1	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Pranata Humas (Terampil)	1	-	1
7.	PPPK			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	2	1	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	2	1	1
8.	Pegawai Pramubakti	15	14	1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		66	49	13
% tase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		100,00	79,03	20,97

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan

dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kejawanan Tahun 2022 sebagai berikut :



1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2022.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran..

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pembangunan Nasional

Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2020-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.



Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Menkuatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial

- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
- 2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP**, yakni:
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- ✓ Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- ✓ Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- ✓ Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- ✓ Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- ✓ Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- ✓ Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- ✓ Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut :

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Kejawanan Cirebon merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Cirebon sepanjang garis pantai 7 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan dimasa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Kejawanan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang di pasarkan sangat mahal. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan

Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan pula adanya industri/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Kejawanan Cirebon.
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu di alokasikan pada PPN Kejawanan Cirebon.
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus di usahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk meguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Kejawanan Cirebon adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, perbulan maupun pertahunnya di Kota Cirebon.
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan didaerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari diharapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut.

7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Cirebon melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Cirebon sendiri, sebagai contoh, Pekerja dalam bidang Pengasinan, Penyortiran, Pembersih, Pengeringan dan lain-lain. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di areal PPN Kejawanan Cirebon maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Steakholder yang ada di Kota Cirebon untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

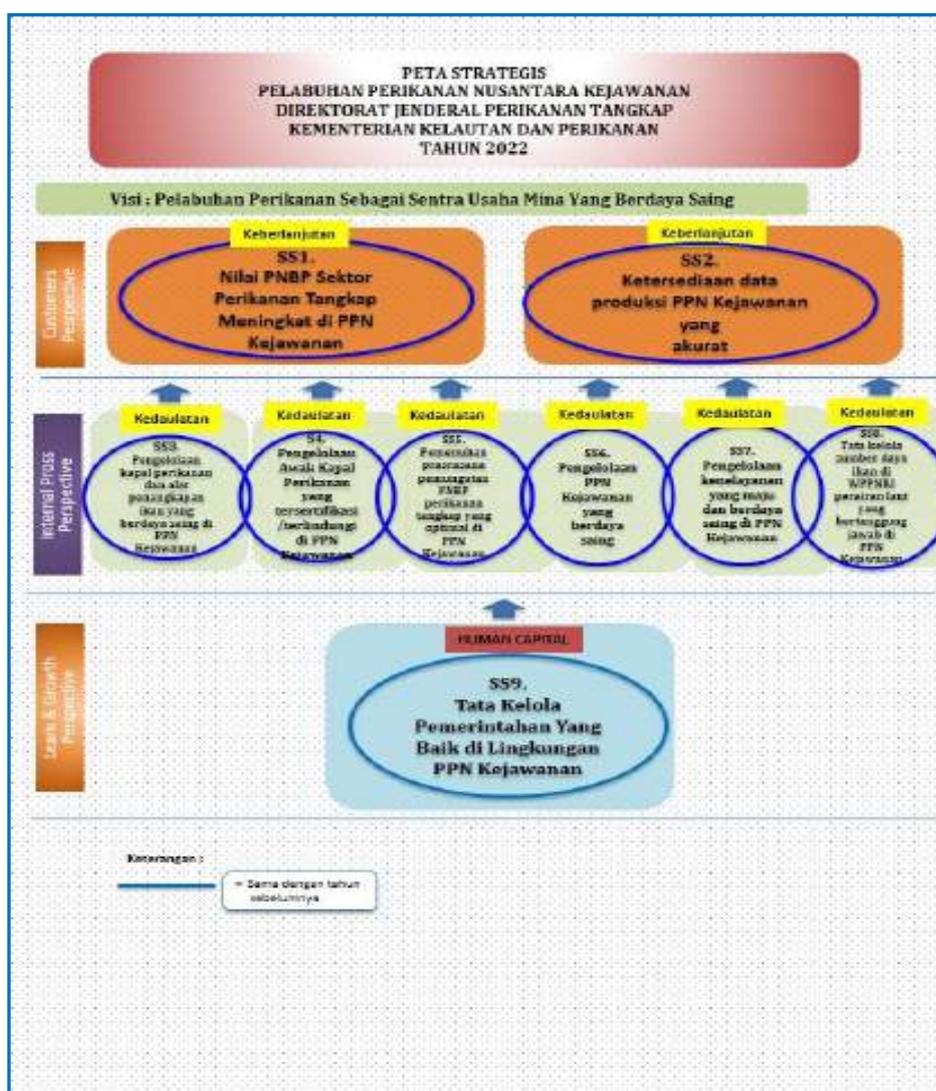
Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp.Juta),
2. Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang akurat, dengan indikator kinerja:
 - a. Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton),
3. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk),
4. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang),
 - b. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang),

5. Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit),
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen),
7. Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang),
8. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan),
9. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai),
 - b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen),
 - c. Nilai Penilaian Mandiri /PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai),
 - d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks),
 - e. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (Persen),
 - f. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)), dengan indikator output :
 - Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
 - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
 - Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
 - Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
 - g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen), dengan indikator output :
 - Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
 - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
 - Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);

- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
 - Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).
- h. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
- i. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai suatu outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini menjabarkan misi keberlanjutan, yakni keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan keberlanjutan sumber daya ikan. Sasaran strategis dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap disajikan dalam gambar peta strategis sebagai berikut :



Gambar 4. Rancangan Peta Strategi PPN Kejawanan Tahun 2022

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level II, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB / CASCADING
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Rp. Juta	2.766,37	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pel. Usaha
2	Ketersediaan data produksi Perikanan Nusantara Kejawanan yang akurat	2 Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	3.500	Triwulan	Akumulasi	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	Produk	100	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya (Orang)	Orang	30	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran
		5 Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)	Orang	30	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran
5	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	6 Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit)	Unit	1	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Kelola & Pelayanan Usaha
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing	7 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	%	82	Triwulan	Rata-rata	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pel. Usaha Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
7	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	Orang	24	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Kelola & Pelayanan Usaha
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan	9 Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	Laporan	120	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB / CASCADING
	Perikanan Nusantara Kejawanan						
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10 Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	75,07	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran Subkoordinator Kelompok Tata Kelola dan Pel. Usaha Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		11 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	%	100	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		12 Nilai Penilaian Mandiri /PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	80,01	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		13 IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	79	Semester	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		14 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (Persen)	%	75	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	%	75	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	%	75	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		17 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	89	Semester	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha
		18 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	81	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subkoordinator Kelompok Tata Usaha

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan DIPA Awal Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senilai Rp18.565.177.000,- tahun 2022 mengalami revisi antara lain :

1. DIPA Satuan Kerja Awal PPN Kejawanan No.SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 17 November 2021 DS. 2008-0584-5976-0073; dengan pagu sebesar **Rp. 12.633.806.000,-**
2. Pada Bulan Desember 2021 telah dilakukan revisi Automatic Adjustment (AA) sebesar **Rp. 213.500.000,-** Dengan No.SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 14 Desember 2021 DS. 9725-8004-8087-0901; (Revisi Ke – 1)
3. Pada Mei 2022 kembali dilakukan revisi Automatic Adjustment (AA) Jilid II sebesar Rp. 90.000.000,- Dengan No.SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 06 Juni 2022 DS. 0408-4275-8498-5459; (Revisi Ke- 2) sehingga Total Revisi Automatic Adjustment (AA) sebesar **Rp. 303.500.000,-**

4. Pada bulan Juli dilakukan kembali Revisi DIPA Hal III dan POK (Kanwil) dengan pagu anggaran tetap. No.SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 15 Juli 2022 DS. 0408-4275-8498-5459; (Revisi Ke- 3)
5. Pada bulan Juli dilakukan kembali Revisi DIPA dan POK (DJA) Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 334.133.000,- dengan rincian tambahan sebagai berikut :
 - a. 2337.ACA.001.053. Pendukung layanan public bidang kapal perikanan sebesar Rp. 150.000.000,-
 - b. 2338.BGA.004.051 ; Jasa Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 184.133.000,- dengan No.SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 15 Juli 2022 DS. 6848-8832-0920-1370; (Revisi Ke- 4 DJA)
Maka dengan revisi ini Pagu Anggaran Satuan Kerja PPN Kejawanon Cirebon berubah MENJADI **Rp. 12.967.939.000,-** yang SEMULA **Rp. 12.633.806.000,-**
6. Pada bulan Oktober Revisi DIPA dan POK (DJA) Penambahan pagu anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian tambahan sebagai berikut : 2338.RBQ.001.051.G; Belanja Pemeliharaan Jaringan Pekerjaan Pemeliharaan Kolam Pelabuhan.
Revisi DIPA Petikan Nomor SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 26 Oktober 2022 DS. 3078-8532-3435-8035; Revisi DIPA Ke - 6 (Enam), dengan pagu terakhir **Rp.17.467.939.000,-** (Tujuh belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
7. Revisi DIPA Ke – 7 (Tujuh). Revisi di laksanakan oleh eselon I DJPT atas permintaan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu Pengalihan blokir dari RO PEN (2338.RBQ ke 2337 QDC). Dengan DIPA Petikan Nomor SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 01 Nopember 2022 DS. 2671-5056-4108-3041;
8. Revisi DIPA Ke – 8 (Delapan) Revisi Kanwil berupa Penambahan Pagu penggunaan PNBPN sebesar **Rp. 902.048.000,-** Dengan DIPA Petikan Nomor SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 15 Nopember 2022 DS. 4100-2071-3901-1903; Sehingga Pagu Total Satuan Kerja PPN Kejawanon berubah menjadi sebesar **Rp. 18.369.987.000,-** dari pagu semula sebesar **Rp. 17.467.939.000,-**
9. Revisi DIPA Ke – 9 (Sembilan) Revisi Ditjen Anggaran berupa Penghapusan Blokir AA (Automatic Adjustment) **Rp. 303.500.000,-** Dengan DIPA Petikan Nomor SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 02 Desember 2022 DS. 7882-9649-0364-5736; Sehingga Pagu Total Satuan Kerja PPN Kejawanon berubah menjadi sebesar **Rp. 18.066.487.000,-** dari pagu semula sebesar **Rp. 18.369.987.000,-**
10. Revisi DIPA Ke – 10 (Sepuluh) Revisi Ditjen Anggaran berupa Penambahan Kekurangan Pagu Gaji sebesar **Rp. 496.690.000,-** Dengan DIPA Petikan Nomor SP.DIPA-032.03.2.622482/2022 Tanggal, 08 Desember 2022 DS. 5634-9541-6664-0072; Sehingga Pagu Total Satuan Kerja PPN Kejawanon berubah menjadi sebesar **Rp. 18.565.177.000,-** dari pagu semula sebesar **Rp. 18.066.487.000,-**
11. **Revisi Satker / POK terakhir POK Ke- 15.**

A. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanon adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan indikator kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang di-cascading dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut :

Tabel 5. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	2.766,37
2	Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang akurat	2	Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	3.500
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	100
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang)	30
		5	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)	30
5	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	6	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing	7	Tingkat operasional operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	82
7	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	24
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	120
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,07
		11	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	100
		12	Nilai Penilaian Mandiri /PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	80,01
		13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	79
		14	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (Persen)	75
15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	75		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	75
		17	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	89
		18	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	81

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk Tahun 2022 dapat dikomposisikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2022

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	277.500.000	272.162.162	98,08
2.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	8.387.682.000	8.358.601.630	99,65
3.	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	3.399.500	84,99
4.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	30.490.000	29.277.000	96,02
5.	2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	9.865.505.000	9.791.484.987	99,25
Jumlah Keseluruhan			18.565.177.000	18.454.925.279	99.41

B. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU ***Perspektif Internal Process dan Learning and Growth*** yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini :

Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-1		TW-2		SMT-1		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
						TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap; Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.01.01	Penerimaan PNPB di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Rp.Juta	Maximize	200	814,95	500	1.763,45	500	1.763,45	900	3.274,18	900	3.274,18	1.661,37	4.591,14	1.661,37	4.591,14
2	Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang akurat	IKS.02.02	Rata-rata volume produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Ton	Maximize	150	180,34	250	309,6	200	244,97	300	290	233,33	259,98	300	350,69	250	282,66
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.03.03	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	Produk	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370	100	701	100	701
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.04.04	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya	Orang	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105	30	105	30	105
5	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.04.05	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	Orang	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	30	40	30	40
6	Pemenuhan prasarana pemungutan PNPB perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.05.06	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk menunjang PNPB perikanan tangkap	Unit	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
7	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing	IKS.06.07	Tingkat operasional operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Persen	Maximize	80	85,33	80	86,58	80	85,96	80	86,75	80	86,22	82	87,47	80,5	86,53
8	Pengelolaan kelelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.07.08	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Orang	Maximize	24	30	24	30	24	30	24	30	24	30	24	30	24	30
9	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.08.09	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	Laporan	Maximize	10	68	25	126	25	126	30	59	30	59	40	381	40	381
10	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.10	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Nilai	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,07	85,49	75,07	85,49
11	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.11	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	Persen	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
12	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Nilai	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,01	80,4	80,01	80,4
13	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Indeks	Maximize	0	0	71	84,86	71	84,86	71	84,86	71	84,86	79	84,86	79	84,86
14	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.14	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis	Persen	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	100	75	100
15	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Persen	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	87,1	75	87,1
16	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Persen	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	85	75	85
17	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.17	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Nilai	Maximize	0	0	80	89,22	80	89,22	80	94,29	80	94,29	89	94,36	89	94,36
18	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	IKS.09.18	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Nilai	Maximize	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	84,31	81	84,31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 diukur melalui 18 indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja (IK) sebagai berikut :

Tabel 1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET TW IV 2022	REALISASI TW IV 2022	% CAPAIAN
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Rp. Juta	2.766,37	1.166,37	4591,14	120,00
2	Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang akurat	2 Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	3.500	300	370,57	83,60
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	Produk	100	100	701	120,00
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang)	Orang	30		105	120,00
		5 Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)	Orang	30		40	120,00
5	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	6 Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit)	Unit	1		1	100,00
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing	7 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	%	82	82	87,47	106,67
7	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	Orang	24	24	30	120,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET TW IV 2022	REALISASI TW IV 2022	% CAPAIAN
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9 Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	Laporan	120	40	128	120,00
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10 Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	75,07	75,07	85,49	113,88
		11 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	%	100	100	100,00	100,00
		12 Nilai Penilaian Mandiri /PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	80,01	80,01	80,40	100,49
		13 IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	79	79	84,86	107,42
		14 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (Persen)	%	75	75	100	133,33
		15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	%	75	75	87,10	116,13
		16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	%	75	75	85,00	113,33
		17 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	89	89	94,41	106,08
		18 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	81	81	84,30	98,02

Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja utama (IKU) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 1 - Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator Penerimaan PNBP merupakan indikator pendapatan negara bukan pajak pada PPN Kejawanan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBP yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA (tambat labuh, perijinan kapal perikanan >30GT) dan non SDA (imbal jasa UPT PPN Kejawanan).

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh selama Triwulan III 2022. Capaiannya berupa nilai realisasi nilai PNBP fungsional sampai dengan triwulan berjalan (kumulatif)

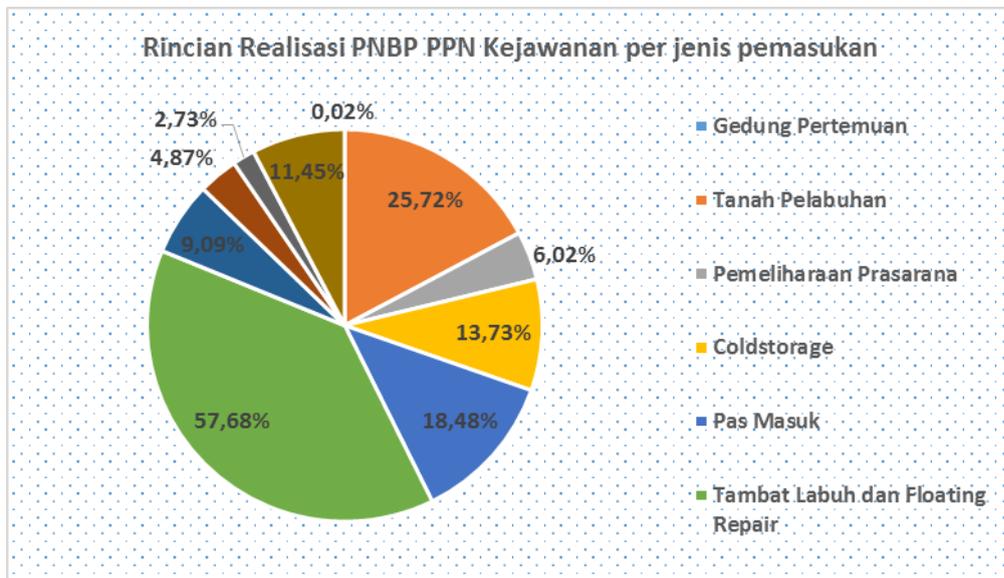
a. Target dan realisasi

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Sektor Perikanan Tangkap di UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahun 2022
		Target	Realisasi	%	
Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp Juta)	2.766,37	1166,37	4591,14	120,00	120,00

Dari target Triwulan IV 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.166,37 Juta, Nilai PNBP di PPN Kejawanan Triwulan IV 2022 tercapai sebesar Rp4591,14 juta atau persentase capaiannya 120,00%.

Capaian tersebut diperoleh dari Tambat Labuh & Floating Repair, Pas Masuk, Coldstorage, Penjualan Air Bersih, Listrik, Kebersihan Kolam Pelabuhan, Kebersihan Bangunan Pelabuhan, Penggunaan Gedung Pertemuan serta Penggunaan Tanah Pelabuhan. Selain itu tambahan yang signifikan terjadi pada saat Wisata Bahari Kejawanan (WBK) mulai dibuka untuk umum dan di luar dugaan terjadi lonjakan pengunjung mengingat di Kota Cirebon tidak terdapat obyek wisata terutama wisata pantai ditambah WBK (Wisata Bahari Kejawanan) mengalami perubahan yang drastis, yang tadinya dikenal kumuh, kotor dan tidak tertata menjadi kawasan wisata pantai yang bersih, indah serta menarik.



Tabel 12. Rincian Nilai PNBP di PPN Kejawanan per Triwulan IV Tahun 2022

No	Bulan	Nilai Capaian Penerimaan PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
1	Oktober	347.431.420
2	November	524.956.286
3	Desember	454.134.514
	TRIWULAN IV	1.326.522.220

Tabel 12. Rincian Nilai PNBP di PPN Kejawanan Tahun 2022

No	Bulan	Nilai Capaian Penerimaan PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
1	Januari	192.898.386
2	Februari	270.286.375
3	Maret	351.774.060
	TRIWULAN I	814.958.821
4	April	263.994.758
5	Mei	365.422.148
6	Juni	319.075.718
	TRIWULAN II	1.763.451.445
7	Juli	656.236.998
8	Agustus	578.025.945
9	September	266.910.410
	TRIWULAN III	3.274.185.545
10	Oktober	347.431.420
11	November	524.956.286
12	Desember	454.134.514
	TRIWULAN IV	4.591.147.018

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Sektor Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Nilai PNBP UPT PPN Kejawanan (Rp. Juta)	5.739,08	3.015,00	4399,07	4591,14

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap tahun sebelumnya yakni Triwulan IV tahun 2021, realisasi Penerimaan PNBP Sektor Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 mengalami peningkatan yakni sebesar 4,36%. Capaian PNBP sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemic Covid-19.

- c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Perbandingan Realisasi Capaian Nilai PNBP PPN Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Nilai PNBP UPT PPN Kejawanan (Rp. Juta)	4591,14	2.766,37	120,00

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Triwulan III 2022 mencapai 120,00%.

- d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional
Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

- e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian Nilai PNBP di PPN Kejawanan pada Triwulan IV 2022 diperoleh dari Tambat Labuh & Floating Repair, Pas Masuk, Coldstorage, Penjualan Air Bersih, Listrik, Kebersihan Kolam Pelabuhan, Kebersihan Bangunan Pelabuhan, Penggunaan Gedung Pertemuan serta Penggunaan Tanah Pelabuhan serta telah dibukanya WBK (Wisata Bahari Kejawanan) yang berdampak luas yaitu terjadinya membludaknya kunjungan dari wisatawan baik yang berasal dari Kota Cirebon maupun luar Kota Cirebon dimana dapat diketahui bahwa di Kota Cirebon tidak banyak terdapat obyek wisata terutama wisata pantai dan juga sejak awal pandemi covid -19 sekitar bulan April 2020 kawasan wisata di PPN Kejawanan ditutup untuk umum sehingga menambah animo masyarakat yang telah lama menunggu untuk dapat kembali melakukan kunjungan wisata di PPN Kejawanan yang telah mengalami perubahan tampilan menjadi kawasan wisata yang indah, bersih serta lebih tertata. Meskipun target Nilai PNBP tercapai melebihi target Triwulan IV 2022, namun pelaksanaan pungutan tambat labuh, coldstorage serta pas masuk yang merupakan penerimaan terbesar PNBP PPN Kejawanan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan antara lainnya kurangnya fasilitas yang mendukung pelaksanaan PNBP. Adapun upaya yang dilakukan yaitu penatalaksanaan pungutan tambat labuh yang telah ditindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi data dari masing-masing pemegang kewenangan data, pengoptimalan pelayanan pas masuk, pas harian wisata bahari serta coldstorage.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 15. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PNBP di PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
5.434.318.000	5.423.290.907	5.423.290.907	99,80	100,00

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk 100,0% namun jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2022 mencapai 99,80%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 target PNBP tahun 2022 telah tercapai sebesar 120,00%, komponen kegiatan dalam RKAK/L yang telah dilaksanakan untuk menunjang kinerja ini adalah pemanfaatan PNBP, operasional pelayanan PNBP dan operasional perusahaan PNBP.

Sasaran Strategis 2

Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang akurat

1. IKU 2 – Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator Kinerja Utama Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan hasil perhitungan rata – rata dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan setiap triwulan.

Realisasi capaian IKU ini dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebanyak 350,69 Ton atau 116,90% dari target Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 300 Ton.

a. Target dan realisasi

Tabel 16. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target 2022
		Target	Realisasi	%	
Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan (Ton)	3.500	300	350,69	116,90	3,34

Dari target Triwulan IV 2022 yang telah ditetapkan sebesar 300 Ton, rata – rata volume produksi perikanan tangkap UPT PPN Kejawanan Triwulan IV 2022 tercapai sebesar 350,69 Ton dengan total volume sebesar 4.446,93 ton atau persentase capaiannya terhadap target tahun 2022 sebesar 120,00%.

Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap bulannya sebagai berikut :

No	Bulan	Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan (Ton)	Nilai Rata - Rata
1	Januari	254,146	
2	Februari	184,59	
3	Maret	102,27	
	TRIWULAN I		180,34
4	April	330,79	
5	Mei	431,38	
6	Juni	792,98	
	TRIWULAN II		349,36
7	Juli	417,53	
8	Agustus	161,25	
9	September	173,66	
	TRIWULAN III		316,51
10	Oktober	682,37	
11	November	508,22	
12	Desember	407,70	
	TRIWULAN IV		370,57

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 17. Perbandingan target Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan Triwulan IV tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi TW IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan (Ton)	-	-	-	370,57

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap target Triwulan IV tahun 2019-2021, realisasi rata - rata volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dikarenakan metode/formula perhitungan IKU tersebut berbeda. Untuk tahun 2019-2021 metode/formula perhitungan yang digunakan adalah akumulasi capaian IKU setiap triwulan sedangkan pada tahun 2022 metode/formula perhitungan capaian IKU menggunakan rata – rata capaian setiap triwulan.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Perbandingan Realisasi Capaian Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan (Ton)	370,57	350	105,88%

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Triwulan IV 2022 baru mencapai 105,88%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional
Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Target rata-rata volume produksi perikanan tangkap pada Triwulan IV 2022 tercapai, dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

- Banyak kapal perikanan ≥ 30 GT yang pindah domisili dari PPN Kejawanana karena adanya perlakuan serta penerapan yang berbeda antar pelabuhan perikanan terkait penerapan tarif berdasarkan PP Nomor 85 tahun 2021 rata – rata sudah kembali ke PPN Kejawanana;
- Adanya penyesuaian harga BBM sehingga kapal – kapal perikanan tidak mengurangi jumlah trip dalam melakukan penangkapan ikan;
- Adanya isu terkait penerapan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNPB Pasca Produksi yang belum diterapkan kepada seluruh pelabuhan perikanan sehingga para pemilik kapal yang tadinya memindahkan lokasi bongkaran dari PPN Kejawanana, sudah kembali melakukan bongkaran di PPN Kejawanana;
- Adanya pemeliharaan kolam pelabuhan yang berdampak pada pengurangan sedimentasi terutama berpengaruh pada lalu lintas keluar masuk kapal perikanan serta kondisi kolam pelabuhan yang tidak dangkal sehingga kapal perikanan tang tadinya kesulitan untuk masuk dan melakukan bongkaran di PPN Kejawanana menjadi lebih mudah.

Meskipun target volume produksi perikanan tangkap pada Triwulan IV 2022 tercapai, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kapal domisili yang cenderung menurun, trend musim ikan yang tidak sesuai dengan perkiraan, dan faktor alam/cuaca. Upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan penggunaan instrumen berbasis digital sehingga data dapat terakomodir secara terpusat, transparan, dan cepat.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 19. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Rata – Rata Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanana Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
15.000.000	13.500.000	13.899.800	92,66	102,96

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini jika dibandingkan dengan Target ROK Triwulan IV 2022 telah mencapai 102,96% namun jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2022 mencapai 92,66%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan dalam RKAK/L dengan kegiatan pendataan kapal bongkar di luar TPI dan penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik.

Sasaran Strategis 3

Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 3 – Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan

Indikator ini merupakan rekapitulasi/jumlah dokumen kapal yang diterbitkan oleh petugas berupa Surat Kelaikan Kapal Perikanan serta Surat Ukur Kapal. Perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk bisa menbitkan dokumen kapal tersebut diatas, wewenang nya masih berada di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP). Oleh karena itu pada tahun 2022 ini DJPT melalui Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan pelatihan, pendidikan serta bimbingan teknis bagi petugas yang telah ditunjuk masing – masing UPT Pelabuhan Perikanan menjadi petugas pemeriksaan/pengujian/inspeksi kapal perikanan.

a. Target dan realisasi

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU Dokumen Kapal yang Diterbitkan

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Dokumen Kapal yang Diterbitkan	100	100	701	120,00	120,00

Karena periode pengukurannya adalah tahunan, maka pada aplikasi belum dapat terlihat capaian indikator kinerja tersebut.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Dokumen Kapal yang Diterbitkan Triwulan III Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Dokumen Kapal yang Diterbitkan	n/a	n/a	n/a	701

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 IKU Dokumen kapal yang diterbitkan terdapat realisasi capaian sebesar 701 dokumen atau sebesar 120,00% dari target tahun 2022 sebesar 100 dokumen.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Perbandingan Realisasi Capaian Dokumen Kapal yang Diterbitkan PPN Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Dokumen Kapal yang Diterbitkan	701	100	701,00

Perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d 2024 adalah sebesar 701,00%, meskipun periode pengukurannya adalah tahunan.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan telah melaksanakan pengukuran serta penerbitan dokumen kapal yang berasal dari pemilik kapal yang menjadi daerah binaan PPN Kejawanan yaitu sepanjang pantura Jawa Barat serta melakukan kegiatan gerai perijinan sebanyak 701 dokumen.

Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah petugas pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan di cakupan wilayah kerja PPN Kejawanan.

Upaya yang dilakukan antara lain memberikan usulan tambahan petugas pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/sertifikasi.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 23. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Dokumen Kapal yang Diterbitkan PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
101.500.000	101.500.000	98.697.193	97,23	100,00

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar 97,23%

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni sosialisasi pemeriksaan kelaikan/pengujian/inspeksi kapal perikanan dan evaluasi pemeriksaan kelaikan/pengujian/inspeksi/kapal perikanan.

Sasaran Strategis 4

Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Pada SS ini terdapat 2 (dua) indikator yaitu : (1) Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya; (2) Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)

1. IKU 4 - Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah nelayan/awak kapal yang telah memperoleh pelatihan, bimtek atau sertifikasi mengenai awak kapal perikanan antara lain Ahli Alat Penangkapan Ikan (AAPI) yang diharapkan awak kapal perikanan/nelayan dapat mengoperasikan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan baik dan efektif sesuai kaidah FAO dan sertifikasi ketrampilan penanganan ikan (SKPI) yang bertujuan agar awak kapal perikanan/nelayan dapat melakukan penanganan, pengolahan, penyimpanan dan refrigerasi ikan sesuai kaidah keamanan pangan.

a. Target dan realisasi

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi	30	30	105	120,00	120,00

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah tahunan. Realisasi capaian IKU ini sebesar 105 orang atau sebesar 120,00% dari target tahun 2022 sebesar 30 orang. Realisasi PPN Kejawanan dicapai dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan (SKN) pada bulan Juli tahun 2022.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	n/a	n/a	n/a	105

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan IV tahun 2022 terdapat capaian sebesar 95 orang melalui kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan (SKN) pada bulan Juli tahun 2022.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya	105	30	350,00

perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d 2024 sebesar 350,00%.

h. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

i. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan yang dilaksanakan di di Desa Way Nipah, Kabupaten tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 25 – 26 Juli 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 95 nelayan. Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu tingkat kesadaran ABK dalam peningkatan kompetensi nelayan masih rendah. Sehingga upaya yang akan dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi kepada nahkoda dan/atau ABK kapal dengan tujuan mengubah mindset melalui Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN).

j. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 27. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
13.000.000	13.000.000	11.219.000	86,3	86,3

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar 86,30%

k. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan Tahun 2022

2. IKU 5 – Awak Kapal Perikanan yang difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah awak kapal yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut dengan pelaku usaha. Adapun tujuan PKL untuk memastikan terpenuhinya persyaratan kerja, kondisi kerja, upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, musibah, kematian, jaminan hukum serta jaminan keamanan bagi awak kapal perikanan.

Melalui Bagian kesyahbandaran PPN Kejawanan dilaksanakannya Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Awak Kapal Perikanan yang didalamnya terdapat klausul Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang menerangkan terkait beberapa hal diantaranya, Hak dan Kewajiban Pemilik dan ABK Kapal Perikanan, Jenis sanksi terhadap Awak Kapal dan Pola Sistem Bagi Hasil. Dari ketiga klausul PKL tersebut diharapkan seluruh pihak bersepakat melaksanakan seluruh butir - butir perjanjian yang tertuang dalam Draft Perjanjian Kerja Lapangan (PKL) dan akan jika semua pihak melanggar perjanjian tersebut maka diberikan sanksi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukum penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi awak kapal perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016.

a. Target dan realisasi

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU Awak kapal yang difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Awak kapal yang difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha	30	30	40	120,00	120,00

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini tahunan. IKU Awak kapal yang difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022 ini didukung oleh anggaran Kegiatan Sertifikasi HAM Perjanjian Kerja Laut serta Jaminan Sosial Bagi Awak Kapal Perikanan.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Awak kapal yang difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanon Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Awak kapal yang difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanon	n/a	n/a	-	40

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap target Triwulan IV tahun 2021, realisasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha PPN Kejawanon Triwulan IV Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dikarenakan metode/formula perhitungan IKU tersebut berbeda.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha	40	30	133,33

Perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanon 2022 s.d 2024 sebesar 133,33%

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Telah dilaksanakan kegiatan Sertifikasi HAM Perikanan dan PKL serta jaminan Sosial di PPN Kejawanon pada tanggal 03 Juni 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Faktor penghambat dalam penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu sebagian besar awak kapal perikanan belum mengetahui manfaat dalam menerapkan Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan dan pemilik kapal belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam pemenuhan jaminan sosial/asuransi.

Langkah-langkah realisasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu melakukan sosialisasi secara mandiri kepada pemilik kapal dan operator kapal perikanan dalam penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 31. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha Triwulan IV 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
13.000.000	13.000.000	12.788.000	98,36	98,36

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar 98,36% dibandingkan dengan pagu anggaran.

g. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan dalam RKAKL yang mendukung tercapainya IKU tersebut adalah Kegiatan Sertifikasi HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut serta Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan dan Kegiatan Sertifikasi Awak Kapal.

Sasaran Strategis 5

Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan

1. IKU 6 – Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap

IKU Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap merupakan kegiatan dalam rangka perencanaan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan dengan memperhatikan kualitas waktu, mutu dan biaya. Pada tahun anggaran 2022 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan mendapatkan anggaran untuk pengembangan fasilitas yaitu Pekerjaan Pembuatan Trestle dan Perkerasan Area Parkir Wisata yang lokasinya berada di area wisata bahari.

Kondisi eksisting wisata bahari PPN Kejawan saat ini telah tersedia kios kuliner, Rumah Bilas dan MCK, Mushola. Melihat hal tersebut diatas Plt. Kepala PPN Kejawan membuat prioritas untuk lebih melakukan penataan wisata bahari agar dapat meningkatkan frekuensi pengunjung yang akan berdampak pada peningkatan PNBP terutama pas masuk, sehingga pada tahun 2022 ini program prioritas akan tetap difokuskan pada penataan wisata bahari dengan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Trestle dan Perkerasan Area Parkir Wisata, dimana saat ini belum tersedia lahan parkir bagi para pengunjung wisata bahari serta agar pengunjung dapat menikmati suasana sunset dan sunrise akan dibuat trestle serta jetty yang juga dapat berfungsi sebagai tanggul/penahan air agar tidak masuk ke kawasan pantai pada saat pasang/rob air laut.

Tahap awal untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah adanya perencanaan yang menghasilkan output berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis serta Metode Pelaksanaan. Semua output tersebut di dokumentasikan menjadi sebuah dokumen perencanaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Perhitungan indikator ini adalah dokumen perencanaan sampai dengan dokumen dalam pelaksanaan pekerjaan serta sampai dengan saat adanya serah terima pekerjaan.

a. Target dan realisasi

Tabel 32. Target dan Realisasi IKU Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di Pelabuhan	1,00	1	1	100,00	100,00

Perikanan Nusantara Kejawanan Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap					
--	--	--	--	--	--

IKU Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di PPN Kejawanan, frekuensi capaiannya adalah tahunan.

- b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 33. Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di PPN Kejawanan Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap	n/a	n/a	1	1

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap tahun sebelumnya yakni Triwulan IV tahun 2021, realisasi pada Triwulan IV tahun 2022 mengalami prosentase yang sama, dengan data dukung capaian IKU Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap tersebut dimulai dari dokumen perencanaan yang diperlukan sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan yang didapat sesuai dengan kualitas mutu, waktu dan biaya sampai dengan serah terima pekerjaan. Untuk dokumen perencanaan sudah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2022 yang rencana pelaksanaan pekerjaan dimulai dari bulan Mei 2022. Pada Triwulan IV tahun 2022 telah selesai dilaksanakan pekerjaan konstruksi Perkerasan Area Parkir Wisata dan Pembuatan Trestle yang berlokasi di kawasan wisata bahari PPN Kejawanan serta pemeliharaan kolam pelabuhan yang telah selesai dan dilakukan pembayaran.

- c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Capaian Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di PPN Kejawanan untuk menunjang PNBP Perikanan Tangkap sd. Triwulan III 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di PPN Kejawanan untuk menunjang PNBP Perikanan Tangkap	1	1	100,00

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian Triwulan II 2022 sebesar 100,00%

- d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

- e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dimana sudah dilakukan pelaksanaan tender pekerjaan perkerasan area parkir wisata dan pembuatan trestle serta pemeliharaan kolam pelabuhan dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan. Semua pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima 100% dan dilakukan pembayaran.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 35. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di PPN Kejawanan untuk Menunjang PNBPN Perikanan Tangkap Triwulan IV 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
5.434.318.000	5.423.290.907	5.423.290.907	99,80	100,00

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk 100,0% namun jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2022 mencapai 99,80%.

g. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan dalam RKAKL yang menunjang kegiatan ini diantaranya pekerjaan perkerasan area parkir wisata dan pembuatan trestle serta pemeliharaan kolam pelabuhan.

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan

1. IKU 7 – Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Perhitungan indikator ini ditinjau dari nilai evaluasi kinerja (EVKIN) PPN Kejawanan yang di nilai oleh eselon I (DJPT).

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meliputi : operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, coldstorage, ice crusher machine, docking/slipway, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air bersih, es, BBM, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang di inspeksi, jumlah kapal hasil yang di inspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin.

a. Target dan realisasi

Tabel 36. Target dan Realisasi IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	82	82	87,47	106,67	106,67

Rincian capaian nilai evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 yang diambil dari Aplikasi PIPP dan dihitung secara rata – rata dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan realisasi sebesar 87,47 atau 106,67%.

No	Bulan	Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan (EVKIN)	Nilai Rata – Rata
1	Januari	86,50	
2	Februari	87,50	
3	Maret	82,00	
	TRIWULAN I		85,33
4	April	88,25	
5	Mei	88,75	
6	Juni	86,50	
	TRIWULAN II		86,58
7	Juli	87,50	
8	Agustus	87,50	
9	September	86,25	
	TRIWULAN III		86,75
10	Oktober	90,75	
11	November	90,75	
12	Desember	87,50	
	TRIWULAN IV		87,47

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Tingkat Operasional UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Tingkat Operasional UPT PPN Kejawanan	76,75	87,41	88,00	87,47

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap tahun sebelumnya yakni Triwulan IV tahun 2021, Tingkat Operasional UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,60%. terhadap target tahun 2022, realisasi indikator ini telah mencapai 106,67%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019-2020, capaian IKU ini justru mengalami peningkatan. Pencapaian realisasi indikator ini berasal dari aplikasi PIPP yaitu nilai evkin yang dihitung serta diukur dari nilai rata – rata Triwulan IV (Januari – Desember) Tahun 2022. Adapun realisasi indikator ini pada Triwulan IV tahun 2022 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 38. Nilai bulanan evaluasi kinerja (evkin) untuk data dukung IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan Triwulan IV Tahun 2022

PPN) PP: Kejawanan Bulan (January, 2022)

No.	Kategori	Kategori	Target		Nilai
			Min	Max	
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
8	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
9	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
10	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
11	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
12	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
13	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
14	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
15	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
16	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
17	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
18	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
19	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
20	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
21	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
22	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
23	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
24	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
25	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
26	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
27	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
28	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
29	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
30	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100

PPN) PP: Kejawanan Bulan (February, 2022)

No.	Kategori	Kategori	Target		Nilai
			Min	Max	
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
8	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
9	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
10	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
11	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
12	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
13	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
14	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
15	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
16	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
17	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
18	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
19	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
20	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
21	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
22	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
23	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
24	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
25	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
26	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
27	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
28	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
29	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100
30	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU	100	100	100

pipa Data Entry
Pusat Informasi Publikasi Perikanan

PPN) PK Kejawanan Bulan (November , 2022)

No.	Kategori	Jumlah	Kategori		Catatan
			Kejawanan	PK	
1	Penyakit/Parasit/Asam Lambung	100	200	100	data kejawanan
2	Buaya	100	10	100	---
3	Kerbau/PTB/Lele	100	10	200	---
4	Uang	100	10	100	---
5	Manajemen Perikanan	10	100	100	Index 11 - 10%
6	Kelembagaan Perikanan	10	100	100	Index 11 - 10%
7	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
8	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
9	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
10	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
11	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
12	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
13	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
14	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
15	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
16	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
17	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
18	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
19	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
20	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
21	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
22	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
23	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
24	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
25	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%

pipa Data Entry
Pusat Informasi Publikasi Perikanan

PPN) PK Kejawanan Bulan (December , 2022)

No.	Kategori	Jumlah	Kategori		Catatan
			Kejawanan	PK	
1	Penyakit/Parasit/Asam Lambung	100	100	100	data kejawanan
2	Buaya	100	10	100	---
3	Kerbau/PTB/Lele	100	10	100	---
4	Uang	100	10	100	---
5	Manajemen Perikanan	10	100	100	Index 11 - 10%
6	Kelembagaan Perikanan	10	100	100	Index 11 - 10%
7	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
8	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
9	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
10	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
11	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
12	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
13	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
14	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
15	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
16	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
17	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
18	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
19	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
20	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
21	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
22	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
23	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
24	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%
25	Kelembagaan Perikanan & Perikanan	100	100	100	Index 11 - 10%

Perhitungan Rata-Rata TW IV :
 $86,5+87,5+82,0+88,25+88,75+86,50+87,50+$
 $87,50+86,25+90,75+90,75+87,50+= 780,75$
 $=1.049,75/12$
 $=87,47$

- c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	87,47	82	106,67

Perbandingan dengan tahun menengah dalam Renstra (2022) adalah 105,79%.

- d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional
Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

- e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Permasalahan yang dihadapi masih ada beberapa indikator yang nilainya masih rendah dari capaian maksimalnya. Upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan pengentrian data yang memungkinkan dapat meningkatkan nilai total. Ditindaklanjuti dengan evaluasi pada tanggal 25 pada akhir bulan Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 36. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
45.460.000	45.460.000	43.938.072	96,65	96,65

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini jika dibandingkan dengan Target ROK Triwulan IV 2022 telah mencapai 96,65% namun jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2022 mencapai 96,65%.

- f. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Beberapa kegiatan dalam RKAK/L merupakan kegiatan yang menunjang kinerja adalah pengelolaan dan operasional kesyahbandaran, pengelolaan dan operasional PIPP, kegiatan diseminasi kesyahbandaran, patroli dialogis kesyahbandaran, pengelolaan dan operasional SHTI, sosialisasi pelayanan jasa, sinkronisasi lintas sektoral penerapan SHTI, pengelolaan dan operasional CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan, sosialisasi SCPIB, resertifikasi ISO 9001 2015, K5, sertifikasi ISO 14001 2015, sosialisasi penanganan kebarkaran serta pengelolaan sampah laut dan limbah, kegiatan tim lintas sektoral keamanan dan ketertiban terpadu, pembayaran gaji dan tunjangan, operasional kantor.

Sasaran Strategis 7

Pengelolaan Kenelayan yang Maju dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 8 – Nelayan yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya

Indikator ini merupakan jumlah nelayan yang telah mendapatkan fasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan non perbankan atau jumlah nelayan

yang telah mendapatkan informasi mengenai pembiayaan fasilitasi kredit dari lembaga perbankan dan non perbankan melalui program pojok pendanaan nelayan yang sekaligus menjadi tempat bertemunya nelayan dengan penyuluh perikanan, petugas konsultan keuangan mitra bank (KKMB), pendamping badan layanan umum lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan (BLU LPMUKP) serta account officer lembaga keuangan dengan tujuan untuk melakukan pendampingan dalam proses pengajuan kredit bagi nelayan. Pengukuran dan pelaporan Indikator ini pada akhir tahun.

IKU jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022 ini didukung oleh anggaran kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan).

a. Target dan realisasi

Tabel 40. Target dan Realisasi IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	24	24	30	120,00	120,00

a. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Presentase	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	-	2	-	30

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terealisasi sebesar 30 orang atau sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2020-2021, capaian pada Triwulan IV tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 30 orang nelayan. Hal ini dikarenakan pendataan terhadap nelayan di PPN Kejawanan dan sekitarnya terkait penyampaian informasi serta rencana pengajuan/permohonan pendanaan usaha program pojok pendanaan nelayan mengalami peningkatan jumlah baik yang hanya memperoleh informasi terkait pojok pendanaan nelayan maupun yang sudah pada tahap pengajuan pinjaman. IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN).

b. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah	Prosentase perbandingan (%)

		dalam Renstra (2022)	
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	30	24	125,00

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra, capaian sampai dengan Triwulan IV 2022 sudah mencapai bahkan melampaui target tahun 2022 sebesar 125,00%.

- c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional
Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

- d. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Pendataan serta penyampain informasi terkait program Pojok Pendanaan Nelayan sudah sejak awal tahun gencar dilakukan oleh petugas dari PPN Kejawanan berdasarkan SK Kepala PPN Kejawanan bersama dengan Tim BLU dengan harapan agar para nelayan mendapat bantuan pinjaman modal untuk menjalankan usaha bidang perikanan tangkap. Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini secara umum diakibatkan dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi person-to-person agar target tahunan tetap tercapai.

- e. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nelayan yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
4.000.000	4.000.000	3.099.500	77,48	77,48

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini jika dibandingkan dengan Target ROK Triwulan IV 2022 telah mencapai 77,48% namun jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2022 mencapai 77,48%.

- f. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen Pelaksanaan rencana aksi melalui Pelaksanaan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan melalui Pojok Pendanaan Nelayan

Sasaran Strategis 8

Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 9 – Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi Pendanaan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah laporan kapal perikanan yang telah menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang ditandai dengan diterbitkannya buku kapal perikanan. Log book penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan. Log book merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan nakhoda mengenai aktivitas penangkapan sumber daya ikan (hasil

tangkapan) di laut yang akan didaratkan di pelabuhan perikanan. Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang tervalidasi data log book penangkapan ikannya. Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan tahun berjalan dengan menghitung jumlah kapal perikanan yang tervalidasi data log book penangkapan ikan pada SILOPI – DSS dan dilaporkan hasil analisis data log booknya berupa data CPUE tahunan dan analisisnya pada akhir tahun. Validasi data log book penangkapan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.48 tahun 2014 tentang log book penangkapan ikan dimana data yang diserahkan adalah lengkap dan benar, yaitu adanya kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan dan kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan.

Penghitungan :

$$\Sigma \text{Kapal} = \text{Kapal}_1 + \text{Kapal}_2 + \dots + \text{Kapal}_n$$

Kapal1 = Kapal perikanan yang melaporkan data log book penangkapan ikan dan dimasukkan pada aplikasi SILOPI – DSS

Indikator ini ditargetkan serta dilaporkan setiap triwulan. Capaian indikator jumlah laporan data logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan III tahun 2022 sebanyak 59 laporan atau sebesar 196,67% dari target Triwulan III tahun 2022. IKU Jumlah laporan data kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan Triwulan III 2022 ini didukung oleh anggaran kegiatan pengumpulan data logbook penangkapan ikan dan diverifikasi.

a. Target dan realisasi

Tabel 45. Target dan Realisasi IKU Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	120	40	128	120,00	106,67

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah triwulan. Pengukuran IKU Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022 memperoleh capaian sebesar 128 laporan dari target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar 40 kapal.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	n/a	n/a	138	128

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan IV tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,24% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV tahun 2021. Pada tahun 2019-2020, IKU tersebut memiliki perbedaan nama IKU, yaitu Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	128	120	106,67

Perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 mencapai 106,67%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Pelaksanaan penerapan Logbook Penangkapan Ikan telah berjalan cukup baik. Mayoritas kapal perikanan terutama yang berukuran di atas 30 GT sudah beralih ke penggunaan Logbook Penangkapan Ikan secara elektronik. Terhadap kapal-kapal perikanan dengan ukuran dibawah 30 GT yang semula masih menggunakan logbook penangkapan ikan manual terus diarahkan untuk beralih ke penggunaan secara elektronik.

Permasalahan yang dihadapi adalah beberapa Nakhoda kapal perikanan kapal dengan ukuran dibawah 30 GT, tidak memiliki handphone berbasis android sehingga terkendala untuk penerapan logbook penangkapan ikan secara elektronik. Untuk mengatasi masalah tersebut direkomendasikan agar menghimbau kepada Pemilik Kapal Perikanan maupun Pengurus Kapal dengan ukuran dibawah 30 GT untuk mengakomodir para Nakhodanya dengan handphone berbasis android yang akan difungsikan untuk penerapan logbook penangkapan ikan secara elektronik. Tindakan lanjut yang telah dilakukan berupa menghimbau kepada Pemilik atau Pengurus Kapal Perikanan dengan ukuran dibawah 30 GT agar memfasilitasi Nakhoda Kapal dengan handphone berbasis android untuk penerapan logbook penangkapan ikan secara elektronik.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 48. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
30.490.000	30.490.000	25.142.000	82,45	82,45

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah sebesar 82,45%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Sub komponen/kegiatan Pengumpulan Data Logbook Penangkapan Ikan dalam RKAK/L merupakan kegiatan yang menunjang kinerja.

Sasaran Strategis 9

Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 9 (sembilan) indikator yakni (1) Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (2) Persentase penyelesaian temuan LHP BPK; (3) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (4) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (5) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis; (6) Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (7) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (8) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (9) Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

1. IKU 10 – Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “*Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kejawanan*” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Internal PPN Kejawanan yang ditunjuk oleh Kepala PPN Kejawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- b. Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c. Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d. Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e. Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f. Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri atas 2 (dua) komponen dengan beberapa area perubahan yakni sebagai berikut :

- (1) Komponen Proses/Pengungkit, mencakup 8 (delapan) area perubahan antara lain :
- Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian : Tim Pembangunan ZI, Roadmap Pembangunan ZI, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
 - Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian : Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
 - Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian,
 - Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian : Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,
 - Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian : Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi
- (2) Komponen Hasil
- Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Korupsi dan Opini BPK,
 - Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan
 - Pengukuran dan pelaporan realisasi indikator ini dilakukan pada akhir tahun berjalan penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dalam hal ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, penganangan dilakukan pada bulan April tahun 2019 dan sudah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) periode Oktober tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021.

a. Target dan realisasi

Tabel 49. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan III Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,07	75,07	85,49	113,88	113,88

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah tahunan. Pengukuran IKU Nilai penilaian mandiri (PM) pembangunan zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022 mendapat capaian sebesar 85,49.

- b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	n/a	n/a	85,49	85,49

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar 85,49 yang diperoleh berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi e-Zi Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2019-2020, IKU tersebut mempunyai perbedaan nama/nomenklatur.

- c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	85,49	75,07	113,88

perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 sebesar 113,88%

- d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

- e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat format LKE yang baru, sehingga perlu ada penyesuaian dan penambahan data dukung lebih lanjut, untuk tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu melengkapi kekurangan data dukung pada masing-masing sub area dan melaksanakan kegiatan monev bulanan.

- f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 52. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
40.870.000	40.870.000	27.799.600	68,01	68,01

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar 68,01%

- g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang merupakan kegiatan dukungan penerapan Reformasi Birokrasi adalah kegiatan yang menunjang kinerja tersebut.

2. IKU 11 – Persentase penyelesaian temuan LHP BPK

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Kejawatan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

a. Target dan realisasi

Tabel 53. Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	100	100	100	100,00	100,00

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah tahunan. Pengukuran IKU Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan Triwulan IV 2022 memperoleh capaian sebesar 100%

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	n/a	n/a	n/a	100

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Persentase Temuan LHP BPK merupakan Indikator Kinerja baru di Tahun 2022. Sampai dengan Triwulan IV tingkat Penyelesaian Temuan LHP BPK di PPN Kejawatan memperoleh capaian 100%.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	100	-	-

Belum dapat melakukan perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawatan 2022 s.d 2024 karena periode pengukurannya adalah tahunan.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap temuan LHP BPK akan dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal II sebagai inspektorat mitra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Semua data dukung sesuai rekomendasi pada LHP BPK tersebut diatas telah disampaikan ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Berkas data dukung tersebut digunakan pemenuhan dokumen bukti pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan LHP BPK. Hal tersebut merupakan faktor pendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Temuan LHP BPK.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 56. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase penyelesaian temuan LHP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
-	-	-	-	-

Tidak terdapat anggaran untuk mendukung tercapainya IKU ini.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan untuk tercapainya IKU tersebut yang merupakan mandatory dari IKU Inspektorat Jenderal adalah Kegiatan perjalanan dalam rangka penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT adalah kegiatan yang menunjang kinerja tersebut

3. IKU 12 – Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP merupakan penilaian mandiri yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang berasal dari Inspektorat Bidang II yang nantinya hasil atas penilaian mandiri tersebut dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta Inpektorat Jenderal Bidang II Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

a. Target dan realisasi

Tabel 57. Target dan Realisasi IKU Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	80,01	80,01	80,40	100,48	100,48

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah tahunan. Pengukuran IKU Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022 belum dapat dilakukan.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	-	86,36	88,71	80,40

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan IV tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,36%, dikarenakan LKE yang digunakan berbeda. Untuk LKE Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2022 menggunakan LKE berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	80,40	80,01	100,48

Perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d 2024 sebesar 100,48%

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat potensi adanya kekurangan dokumen data dukung SAKIP sampai dengan Triwulan III 2022 dikarenakan adanya perubahan LKE PM SAKIP sesuai dengan Permenpan RB yang baru, PermenPANBR No 88 tahun 2021. Upaya yang direkomendasikan yaitu untuk melakukan pra penilaian LHE PM SAKIP dengan data dukung sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dan tetap dilakukan pemantauan secara berkala untuk periode selanjutnya dengan melakukan exercise penggunaan LKE yang baru.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 60. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Penilaian Mandiri/ PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
19.000.000	19.000.000	15.896.425	83,66	83,66

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini jika dibandingkan dengan Target ROK Triwulan IV 2022 telah mencapai 83,66% namun jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022 mencapai 83,66%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut

4. IKU 13 – IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan lingkup

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi IKU ini diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan untuk ASN di setiap Seksi/Subbag di PPN Kejawatan. IKU ini didukung oleh anggaran penyusunan administrasi perencanaan dan pengembangan SDM aparatur.

Pada level II IKU ini di cascading ke Level III (semua Bagian dan sub bagian) dengan perhitungan secara tahunan dengan indikator sebagai berikut :

Dalam penilaian kompetensi pejabat struktural lingkup UPT PPN Kejawatan, terdapat 12 komponen standar kompetensi yakni sebagai berikut :

1. Integritas dengan kriteria : (a) Konsisten dan berpegang pada etika dan tata nilai organisasi yang berlaku, (b) Secara terbuka menyatakan pandangan tentang ketidak etisan meskipun hal itu akan merusak hubungan kerjanya, (c) Mengajak orang lain untuk membangun kepercayaan dan berkerja sesuai dengan etika organisasi yang berlaku, (d) Membangun pola cata kerja atau iklim kerja yang kondusif dengan memberikan suasana yang dapat menumbuhkembangkan saling percaya dan (e) Menjadi contoh bagi orang lain dalam bertindak/bekerja sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja.
2. Kepemimpinan dengan kriteria : (a) Memberikan Penjelasan Kepada Tim Kerja, (b) Melakukan bimbingan kepada tim kerja, (c) Pendelegasian tugas dan wewenang, (d) Pengorganisasian sumber daya yang ada dan (e) Membangun situasi yang kondusif.
3. Perencanaan pengorganisasian dengan kriteria : (a) Mengetahui jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan organisasi, (b) Menentukan skala prioritas kegiatan kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, (c) Memprediksi permasalahan dan menyusun tahapan penyelesaian masalah yang timbul, (d) Menggunakan penyelesaian secara sistimatis dalam menghadapi masalah dan membuat alternatif-alternatif untuk meningkatkan kinerja dan (e) Merumuskan tindakan jangka panjang sesuai dengan tujuan organisasi.
4. Kerjasama, dengan kriteria : (a) Bersikap pasif dalam kelompok. Mendukung tujuan dan keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan tugas secara bersama. Berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.
5. Fleksibilitas berpikir, dengan kriteria : (a) Tidak mampu menerima pandangan dari orang lain. Mengikuti alur pemikiran pandangan dari orang lain Berupaya mendapatkan pandangan dari

- berbagai pihak dalam menghadapi perubahan situasi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.
6. Berorientasi pada kualitas, dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, (b) Memperhatikan jalannya pelaksanaan tugas didukung dengan bahan yang benar, Mengamati prosedur kerja dengan cermat untuk mengantisipasi masalah yang timbul dan menetapkan standar kerja, (c) Membuat standar kerja baru untuk memperbaiki proses kerja agar efektif dan efisien. Mengawasi jalannya pekerjaan untuk menghindari kesalahan dengan membuat sistem pengawasan yang lebih efektif.
 7. Berorientasi pada pelayanan, dengan kriteria : (a) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku Memberikan pelayanan secara tepat dan tepat sesuai kebutuhan pelanggan, (b) Mengevaluasi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan, (c) Mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memprediksi perubahan kebutuhan pelanggan. Mengembangkan metode baru dalam meningkatkan pelayanan.
 8. Manajemen Waktu dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan yang sudah ada tanpa mempertimbangkan waktu yang disediakan, (b) Menyusun beberapa kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan batas waktu yang telah ditetapkan, (c) Memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, (d) Menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan batasan waktu yang diperlukan dan (e) Menentukan prioritas pekerjaan disesuaikan dengan target waktu yang ada.
 9. Pengambilan keputusan dengan kriteria : (a) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, (b) Mengumpulkan informasi dan dukungan dari lingkungan dalam pengambilan keputusan, (c) Membuat keputusan penyelesaian masalah dengan telah mempertimbangkan konsekuensinya, (d) Menetapkan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan (e) Memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasil-hasil dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
 10. Pengaturan kerja dengan kriteria : (a) Mengenali tugas/pekerjaan yang lebih penting dan kurang penting, (b) Memastikan perlengkapan yang terkait dengan pekerjaan telah tersedia sesuai kebutuhan, (c) Menyusun alokasi dan penggunaan waktu yang efektif untuk penyelesaian pekerjaan, (d) Mengkoordinasi antara perencanaan kerja orang lain dan diri sendiri untuk menghindari masalah dan (e) Memanfaatkan berbagai sumber yang ada secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah.
 11. Kepemimpinan strategis
 12. Membangun hubungan kerja strategis.

Selain penilaian kompetensi juga ada penilaian terhadap tingkat kualifikasi pendidikan, kinerja serta disiplin yang artinya melihat pegawai apakah sudah pernah atau tidak pernah mendapat hukuman terkait kedisiplinan. Dari keempat komponen penilaian dihitung dengan membuat rata – rata yang menghasilkan indeks profesionalitas dari ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

a. Target dan realisasi

Tabel 61. Target dan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan III			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	79	79	84,86	107,41	107,41

Realisasi capaian IKU IP ASN PPN Kejawanan sebesar 84,86 yang diperoleh dari web Biro Kepegawaian DJPT. Realisasi capaian sampai dengan Triwulan IV 2022 dibandingkan target tahun 2022 telah mencapai 107,41%.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 62. Perbandingan Realisasi IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	-	67,58	80,47	84,86

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan IV tahun 2022 dibandingkan Realisasi pada Triwulan IV tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 5,45%-25,57%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 untuk seluruh pegawai PPN Kejawanan diarahkan untuk berperan aktif dalam mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi serta kemampuan bagi pegawai PPN Kejawanan.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 63. Perbandingan Realisasi IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	84,86	79	107,41

Perbandingan Realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d 2024 sebesar 107,41%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Sampai pada Triwulan IV 2022 pegawai yang mengikuti bimtek dan sosialisasi lebih berperan aktif baik yang dilakukan secara daring maupun luring serta melaporkan hasil kegiatan yang diikuti ke bagian kepegawaian, sehingga tidak ada kendala yang berarti. Direkomendasikan untuk mengunggah sertifikat bimtek/sosialisasi pegawai secara berkala pada aplikasi e- pegawai, serta memberikan reminder kepada pegawai untuk pengumpulan sertifikat hasil diklat/bimtek/sosialisasi

ke pengelola kepegawaian. Telah dilakukan reminder kepada seluruh pegawai terkait pengumpulan sertifikat bimtek/diklat/sosialisasi dan mengunggah data dukung pada aplikasi SIMPEG.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 64. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
13.500.000	13.500.000	11.003.834	81,50	81,50

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini jika dibandingkan dengan Target ROK Triwulan IV 2022 telah mencapai 81,50% namun jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022 mencapai 81,50%.

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni komponen kegiatan Penyusunan Administrasi Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM dan manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PNS.

5. IKU 14 – Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis (Persen)

Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPT. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- Mendukung capaian prioritas nasional;
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

a. Target dan realisasi

Tabel 65. Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis (Persen)	75	75	100	120,00	120,00

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah tahunan. Pengukuran IKU Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III 2022 memperoleh capaian sebesar 120,00%.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis (Persen)	n/a	n/a	n/a	100

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis pada Triwulan IV tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena merupakan IKU baru yang merupakan IKU Mandatory dari Inspektorat Jenderal.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis (Persen)	100	-	-

Tidak dapat melakukan perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d 2024 karena merupakan IKU baru pada tahun 2022..

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup PPN Kejawanan. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Dalam pelaksanaan IKU tersebut tidak memiliki kendala berarti.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
5.481.808.000	5.481.808.000	5.474.617.752	99,86	99,86

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar 99,86%

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.

6. IKU 15 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN, dan kegiatan prioritas/strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan monitoring dalam kepatuhan pengelolaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku pembangunan lingkup KKP Target indikator ini akhir tahun adalah nilai 72,50.

a. Target dan realisasi

Tabel 69. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	75	75	87,10	116,13	116,13

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah tahunan. Pengukuran IKU Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022 mendapat realisasi capaian sebesar 116,13%

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	n/a	n/a	87,10	87,10

Capaian pada Triwulan IV 2021 dan capaian Triwulan IV 2022 jika dibandingkan memperoleh capaian yang sama yaitu sebesar 87,10.

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	87,10	75	116,13

perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d 2024 sebesar 116,13%.

- d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional
Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional
- e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
Telah dilaksanakan pengadaan jasa melalui penyedia sebanyak 22 Paket dari 35 paket yang telah diumumkan pada SIRUP. Direkomendasikan untuk memantau dan jika dimungkinkan percepatan pengadaan jasa melalui penyedia serta dilakukan pemantauan dan percepatan PBJ.
- f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 72. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
5.481.808.000	5.481.808.000	5.474.617.752	99,86	99,86

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar 99,86%

- g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja
Komponen kegiatan dalam RKAK/L yaitu Komponen honor pejabat pengadaan barang/jasa merupakan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut

7. IKU 16 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup PPN Kejawanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah Tahunan

- a. Target dan realisasi

Tabel 73. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	75	75	85	113,33	113,33

Capaian pada Triwulan IV 2021 sebesar 85 atau 113,33% dibandingkan dengan target tahun 2022.

- b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	n/a	n/a	85,00	85,00

Capaian pada Triwulan IV 2021 dan capaian Triwulan IV 2022 memperoleh capaian yang sama.

- c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 75. Perbandingan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	85	75	113,33

Perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d sebesar 113,33%

- d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

- e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya sensus BMN Tahun 2022 yang telah selesai sesuai target. Telah dilakukan sensus dengan progres nilai sebesar 100,00% dan NUP sebesar 85,18%. Telah diusulkan PSP dengan surat No. 1296/KPB-PPNK/PL.710/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

- f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 76. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
19.800.000	19.800.000	11.994.168	60,57	60,57

Realisasi anggaran Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini jika dibandingkan dengan Target ROK Triwulan IV 2022 telah mencapai 60,57% namun jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022 mencapai 60,57%.

- g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yaitu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kantor dan perjalanan dalam rangka penyusunan RKBMN lingkup DJPT TA. 2023 merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.

8. IKU 17 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Dasar hukum penilaian IKPA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Fokus penilaian dalam PMK tersebut adalah bukan hanya besarnya penyerapan anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tetapi juga pada pencapaian output anggaran melalui :

- a) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM;

- b) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D; dan
- c) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL?LKPP) (penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, memuat 12 (dua belas) komponen adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA;
2. Halaman II DIPA;
3. Pengelolaan UP;
4. Rekon LPJ Bendahara;
5. Data Kontrak;
6. Penyelesaian Tagihan;
7. Penyerapan Anggaran;
8. Retur SP2D;
9. Perencanaan Kas;
10. Pengembalian SPM;
11. Dispensasi Penyampaian SPM; dan
12. Pagi Minus.

Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

2. Halaman II DIPA, Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Realisasi Penarikan Dana} - \text{Perencanaan Hal III DIPA}}{\text{Perencanaan Hal III DIPA}}$$

3. Pengelolaan UP, Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100\%$$

4. Rekon LPJ Bendahara, Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang di sampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100\%$$

5. Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100\%$$

6. Penyelesaian Tagihan, Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100\%$$

7. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk Triwulan I-IV sebesar 15%, Tahun 40%, Tahun sebesar 60% dan Tahun sebesar 90%. K/L dengan tingkat realisasi di atas target per triwulan ke atas di berikan nilai maksimal, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100\%$$

8. Retur SP2D (Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN)

$$\left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100\%$$

9. Perencanaan Kas, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100\%$$

10. Pengembalian SPM, Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (Jumlah SPM yang diterbitkan KL termasuk Jumlah SPM yang salah/ditolak). Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100\%$$

11. Dispensasi Penyampaian SPM, Dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100\%$$

12. Pagu Minus, Dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100\%$$

Nilai IKPA lingkup PPN Kejawanan merupakan indikator yang menunjukkan nilai kinerja anggaran lingkup PPN Kejawanan. Nilai tersebut diambil dari nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran yang dapat diakses dari aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI. Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap bulannya agar :

- Pengelolaan APBN semakin baik dan berkualitas;
- Adanya upaya pencapaian terbaik dari setiap Satker; dan
- Terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan anggaran yang pruden dan berkualitas.

IKPA akan menjadi salah satu monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran Satker yang tercermin dalam 4 aspek yaitu :

- Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
- Aspek kepatuhan dan regulasi;
- Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
- Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Nilai IKPA didapat dari pada nilai Monev PA pada Aplikasi OM-SPAN.

a. Target dan realisasi

Tabel 77. Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	89	89	94,36	106,02	106,02

Realisasi IKU Nilai IKPA PPN Kejawanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 94,36 dibandingkan dengan target Triwulan IV tahun 2022 sebesar 89,00.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	-	95,79	95,67	94,36

Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya, prosentase capaian Triwulan IV 2022 mengalami penurunan sebesar 1,36%

- c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	94,36	89	106,02

Perbandingan dengan target menengah dalam Renstra PPN Kejawanan 2022 s.d 2024 adalah sebesar 106,02%.

- d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional
Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

- e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Permasalahan yang dihadapi adalah terdapat perubahan formula penilaian dari Kemenkeu sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas petugas dalam pengisian aplikasi SMART DJA Screen reader support enabled. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas petugas dengan mengikuti sosialisasi dari Kementerian Keuangan.

- f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 80. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
-	-	-	-	-

Tidak ada anggaran sampai dengan Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU

- g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan Kegiatan yang menunjang kinerja adalah penyusunan RKAKL dan Kegiatan SIMAK dan SAIBA.

9. IKU 18 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan – Nilai

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feedback) perbaikan (improve) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam

rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aplikasi ini dibangun dengan sistem web-based, digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

a. Target dan realisasi

Tabel 81. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022

Nama IKU	Target 2022	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	81	81	84,31	104,09	104,09

Pengukuran dan pelaporan Indikator ini adalah tahunan. Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2022 memperoleh capaian sebesar 84,31 atau 104,09% dibandingkan dengan target tahun 2022.

b. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2019-2021

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	n/a	n/a	85,84	84,31

.Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya, prosentase capaian Triwulan IV 2022 mengalami penurunan sebesar 1,78%

c. Perbandingan dengan target menengah

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sd. Triwulan IV 2022 dengan Target Menengah dalam Renstra

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2022	Target Menengah dalam Renstra (2022)	Prosentase perbandingan (%)
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	84,31	81	104,09

Perbandingan dengan target menengah dalam renstra sebesar 104,09%

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut. Faktor penghambat pencapaian NKA yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 84. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan Triwulan IV Tahun 2022

Pagu Anggaran (Rp)	Target ROK (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Pagu Anggaran (%)	Prosentase thd Target ROK (%)
-	-	-	-	-

Tidak ada anggaran sampai dengan Triwulan IV 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini

g. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Triwulan IV Tahun 2022 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp18.565.177.000,- yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 85. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2022

KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	277.500.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	8.387.682.000
2339	Pengendalian Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	30.490.000
2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	9.865.505.000
TOTAL		18.565.177.000,-

Dari pagu anggaran tersebut diatas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kegiatannya telah memperoleh realisasi capaian anggaran sebesar **Rp18.565.177.000,-** atau **99,41%** dari jumlah pagu Tahun 2022.

Tabel 86. Realisasi Keuangan PPN Kejawatan s/d Triwulan IV Tahun 2022

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	277.500.000	272.162.162	98,08
2.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	8.387.682.000	8.358.601.630	99,65
3.	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	3.399.500	84,99
4.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	30.490.000	29.277.000	96,02

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
5.	2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	9.865.505.000	9.791.484.987	99,25

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan dukungan anggaran **Rp18.565.177.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp18.454.925.279,-** atau **99,41%** dari total pagu Tahun 2022. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **114,73%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2022

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2022 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target s/d Triwulan IV Tahun 2022 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas) indikator sebagai berikut :

1. IK1 – Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)
2. IK2 – Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)
3. IK3 – Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
4. IK4 – Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang)
5. IK5 – Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)

6. IK6 – Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit)
7. IK7– Tingkat operasional operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
8. IK8 – Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)
9. IK9 – Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)
10. IK10 – Nilai Penilaian Mandiri (PM) Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
11. IK11 – Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)
12. IK12 – Nilai Penilaian Mandiri / PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 – IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 – Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis (Persen)
15. IK15 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK16 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
17. IK17 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
18. IK18 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

B. SARAN

Dengan tercapainya semua target IKU pada Triwulan IV 2022 diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di tahun berikutnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Kejawanan secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan IV 2022 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Adapun saran yang direkomendasikan yaitu melaksanakan pelaporan secara rutin dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Semoga Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan IV 2022 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPN Kejawanan Triwulan IV 2022 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Kejawanan di triwulan selanjutnya.